

**PENGESAMPINGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP TERPIDANA PORNOGRAFI DALAM PERKARA ANAK
(Kajian Yuridis Empiris Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct)**



**Disusun sebagai satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NIKO ANDRIYADI

C. 100.120.192

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGESAMPINGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP TERPIDANA PORNOGRAFI DALAM PERKARA ANAK
(Kajian Yuridis Empiris Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NIKO ANDRIYADI
C. 100.120.192

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(HARTANTO, SH, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAMPINGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP TERPIDANA PORNOGRAFI DALAM PERKARA ANAK
(Kajian Yuridis Empiris Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct)

Oleh:

NIKO ANDRIYADI
C. 100.120.192

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, SH., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 September 2017

Penulis



NIKO ANDRIYADI
C. 100.120.192

**PENGESAMPINGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP TERPIDANA PORNOGRAFI DALAM PERKARA ANAK
(Kajian Yuridis Empiris Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct)**

ABSTRAK

Globalisasi merupakan akibat nyata kian majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi komunikasi dan informasi serta komunikasi elektronik. Salah satu kejahatan komunikasi elektronik belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi atau *cyberporn*. Guna mencegahnya, pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebuah contoh kasus *cyberporn*, mengemuka melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Pacitan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct, tertanggal 31 Mei 2016, dengan terpidana anak-anak. Dalam putusan ini, hakim merujuk UU Pornografi, KUHP, UU Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, tidak menyentuh UU ITE. Itu sebabnya, latar belakang penulisan hukum ini mempertanyakan upaya pengesampingan UU ITE, berdasarkan kajian yuridis empiris dari putusan tersebut. Diharapkan, penulisan ini mampu mengetahui sebab dari pengesampingan UU ITE serta dampak hukum yang timbul, dari sudut pandang putusan tersebut. Dengan harapan, mampu memberikan masukan serta mengembangkan teori-teori khususnya penegakan hukum tindak pidana pornografi terhadap anak yang menggunakan media teknologi, namun belum menyentuh sudut pandang UU ITE. Data dalam penulisan ini dihimpun melalui wawancara bersama hakim tunggal Pengadilan Negeri Pacitan yang menjatuhkan putusan tersebut, dan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pacitan yang memberikan dakwaan sekaligus tuntutan. Hasil itu kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan kondisi atau kenyataan dalam proses penjatuhan putusan tersebut. Kemudian diurai, diidentifikasi, disusun dan diolah secara sistematis. Berujung pada kesimpulan dan saran dari penulis dengan merujuk aturan hukum relevan beserta teori-teori terkait. Hasil penulisan ini, menunjukkan bahwa Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct berangkat dari dakwaan Penuntut Umum yang merujuk ketentuan UU Pornografi. Karena posisi para terpidana masih berstatus anak dan pelajar, digunakanlah ketentuan yang dirasa cukup ringan, dengan harapan mampu menimbulkan efek jera. Selain itu, ketentuan UU Pornografi dinilai lebih mudah untuk dibuktikan unsur pidananya. Putusan yang dijatuhkan pun selaras dari dakwaan tunggal tersebut, yakni mengembalikan para terpidana anak kepada orang tua. Hal itu juga menunjukkan bahwa UU Pornografi lebih dominan. Sehingga, apabila UU ITE dipaksakan digunakan, dan saat persidangan justru tidak dapat dibuktikan unsur-unsurnya, justru memiliki potensi dakwaan kabur atau tidak dapat diterima. Dampaknya, para terdakwa bisa dinyatakan bebas ketika mengajukan keberatan. Kredibilitas Penuntut Umum juga dipertanyakan ketika keadaan tersebut terjadi. Upaya menimbulkan efek jera, seharusnya dibarengi sanksi tegas. Termasuk, tindakan hakim membenarkan dakwaan tunggal, juga seharusnya melalui kajian mendalam.

Sebab tidak ada jaminan dakwaan tunggal dapat dibenarkan. Pada posisi inilah peran Penuntut Umum dipertaruhkan. Sehingga hakim kiranya bisa lebih adil dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Pornografi, Putusan Perkara Anak.

ABSTRACT

Globalization is a real result of increasingly advanced human civilization in the field of science and technology (IPTEK), especially communication and information technology and electronic communications. One of the recent crimes of electronic communications is the loading of elements of pornography or cyberporn. To prevent this, the government passed Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). An example of a cyberporn case, surfaced through the verdict of Pacitan District Court number 5 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Pct, dated May 31, 2016, with the convicted children. In this ruling, the judge referred to the Pornography Act, Criminal Code, Child Protection Law and Criminal Procedure Code (KUHAP). However, it does not touch the ITE Act. That is why, the background of this legal writing questioned the effort to waive the ITE Act, based on empirical juridical studies of the verdict.

Hopefully, this writing is able to find out the cause of the waiver of UU ITE and the legal impact that arises, from the point of view of the decision. With the hope, able to provide input and develop theories, especially law enforcement of pornography against children using technology media, but has not touched the point of view of the Law on ITE. The data in this writing was compiled through interviews with a single judge of the Pacitan District Court who passed the verdict, and the public prosecutor of the Pacitan District Attorney who gave the indictment as well as his demands. The results are then analyzed descriptively qualitative, by describing the condition or reality in the process of the ruling. Then parsed, identified, compiled and processed systematically. Culminates in the conclusions and suggestions of the authors by referring to relevant legal rules and related theories. The results of this writing, indicating that Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Pct depart from the indictment of the Public Prosecutor who refers to the provisions of the Pornography Act. Because the position of the convicts is still a child and student status, used the provisions that are considered quite light, in the hope of causing a deterrent effect. In addition, the provisions of the Pornography Act are considered easier to prove its criminal element. The verdict is also harmonized from the single indictment, namely returning the convicted child to the parents. It also shows that the Pornography Act is more dominant. Thus, if the ITE Act is enforced, and when the trial can not be proved its elements, it has the potential for fraudulent or unacceptable charges. As a result, the defendants can be declared free when objecting. The credibility of the Prosecutor is also questioned when such circumstances occur. Efforts to cause deterrent effect, should be accompanied by strict sanctions. Including, the judge's

actions justify a single indictment, it should also be through in-depth review. For no guarantee of a single indictment can be justified. In this position the role of the Prosecutor is at stake. So the judge would be fairer in dropping the verdict.

Keywords: Electronic Information and Transaction Law, Pornography Crime, Child Case Decision

1. PENDAHULUAN

Perubahan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi adanya perkembangan zaman. Kondisi ini merupakan sebuah proses yang ujungnya mampu membawa seluruh manusia menjadi “*world society*” serta “*global society*”. Hal tersebut dibarengi dengan proses pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi. Sehingga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Termasuk menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Termasuk mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet dan/atau sistem komunikasi elektronik yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi atau *cyberporn*. Untuk mendapatkan unsur tersebut, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet (*computer network*) tertentu.

Pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹ Hal ini bukan masalah baru, karena

¹ Neng Djubaedah, 2011, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah atau melarang hingga menentukan hukumannya.

Untuk itu, guna mencegah lolosnya pelaku tindak pidana *cyberporn*, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Cyberporn yang sudah merajalela ini sangat sulit dibendung ataupun diatur. Sehingga anak-anak juga dapat membuka situs-situs tersebut, bahkan mengakses melalui telepon selular atau *smartphone*. Hal ini tentu membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban. Sebab, penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Sebuah contoh perkara dari kondisi tersebut, terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Pacitan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct, tertanggal 31 Mei 2016. Pelaku yang terlibat ada tiga orang, yang seluruhnya masih berstatus anak/pelajar. Ketiganya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “membuat pornografi”, serta dijatuhi hukuman untuk dikembalikan kepada orang tua masing-masing.

Dalam kondisi ini, hakim tunggal Dian Mega Ayu, SH, MH, justru merujuk pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal. Termasuk mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pada UU Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara, UU ITE justru tidak disentuh.

Itu sebabnya, dalam penulisan ini, penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam dari putusan di Pengadilan Negeri Pacitan tersebut. Permasalahan yang diangkat, meliputi latar belakang mengapa UU ITE tidak menjadi dasar rujukan atau dikesampingkan dalam menjatuhkan putusan para

terpidana anak tersebut serta bagaimana dampak hukum dari pengesampingan UU ITE dalam putusan nomor 5/Pid.Sus- Anak/2016/PN Pct ini.

Arah penulisan ini, dimulai dari pembahasan mengenai tindak pidana pornografi, khususnya yang memanfaatkan media teknologi digital atau *cyberporn*. Kemudian melakukan analisa unsur pidana yang muncul. Sebab, hukum pidana adalah hukum yang terikat pada ruang dan waktu. Sehingga mengenai kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, harus jelas diketahui. Penentuan tempat terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting. Apabila penuntut umum tidak memuat unsur ini dalam dakwaannya mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum.²

Sementara itu, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan UU ITE, Lawrence M. Friedman menyuguhkan teori bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³

Sistem hukum memiliki struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁴ Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Diharapkan, penulisan ini mampu mengetahui mengapa UU ITE dikesampingkan terhadap terpidana pornografi dalam perkara anak dari sudut pandang putusan Pengadilan Negeri Pacitan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN

² Jan Ramelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 195.

³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Perspective*, dalam Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tatanusa, hal 190.

⁴ *ibid*, hal 8.

Pct. Serta mengetahui dampak hukum dari pengesampingan UU ITE dari putusan tersebut. Manfaat yang diharapkan, secara teoritis mampu memberikan masukan serta mengembangkan teori-teori dalam aspek ilmu hukum. Khususnya penegakan hukum tindak pidana pornografi terhadap anak dengan menggunakan media teknologi, namun belum menyentuh sudut pandang UU ITE di Pengadilan Negeri Pacitan pada khususnya, dan tingkat peradilan lainnya pada umumnya. Dan secara praktis, diharapkan bermanfaat bagi penulis serta pembaca, guna disumbangkan untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana pornografi dengan menggunakan media teknologi, khususnya yang dilakukan oleh terpidana anak dan pelaku lain pada umumnya.

2. METODE

Objek penulisan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yakni memandang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, serta secara empiris digunakan untuk mengkaji implementasi terhadap aturan yang berlaku. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Pacitan, dengan melakukan wawancara kepada hakim tunggal yang memeriksa dan menjatuhkan putusan tersebut, serta penggalan informasi kepada Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan dakwaan sekaligus tuntutan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang didapat adalah deskriptif kualitatif guna menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.⁵ Yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara jelas kondisi atau kenyataan dalam proses penjatuhan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct. Kemudian dianalisis dengan cara menguraikan, mengidentifikasi, disusun dan diolah secara sistematis. Yang kemudian berujung pada sebuah kesimpulan dan saran yang terurai dari pendapat penulis

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 60.

dengan merujuk aturan hukum yang relevan beserta teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengesampingan UU ITE terhadap Terpidana Pornografi dalam Perkara Anak dari Sudut Pandang Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct

Sebelum membahas lebih lanjut proses pengesampingan UU ITE terhadap terpidana pornografi dalam perkara anak dari sudut pandang Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct, penulis akan memulainya dengan menguraikan duduk perkara putusan tersebut. Mengutip dari putusan tersebut, duduk perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa ia anak 1. ANANG MA'RUP bin SUTOIB, anak 2. AZIZ NUR ARIFIN bin PURGIANTO dan anak 3. HENY FARAITYO bin SULISTYO bin SUBARI bersama-sama dengan saksi FIKI IRAWAN bin SUWARNO dan saksi RIO FARDIAN bin SUWARNO (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Rabu, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di pantai Ndaki, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka anak dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awal mulanya para anak sepulang sekolah mampir di warung kopi di area pantai Ndaki dekat PLTU Sudimoro Pacitan, Bahwa kemudian para anak berniat mencari kepiting di pinggir pantai dan sesampai di tempat yang dimaksud para anak melihat seorang laki-laki (saksi Joni) dan seorang perempuan (saksi Fuput) sedang

pacaran dengan rebahan di atas rerumputan di bawah sebuah pohon, Bahwa kemudian para anak berpecah mendekati tempat saksi Joni dan Fuput tersebut untuk melihat lebih jelas apa yang sedang mereka lakukan, Bahwa setelah dekat para terdakwa melihat saksi Joni dan saksi Fuput sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi saksi Fuput dibawah dan saksi Joni diatas, Bahwa melihat hal tersebut saksi Anang Ma'rup mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi Fiki agar saksi Fiki datang ke tempat tersebut. Bahwa tidak lama kemudian saksi Fiki datang ketempat tersebut bersama saksi Rio. Bahwa kemudian para anak bersama saksi Fiki dan saksi Rio mendekati saksi Joni dan saksi Fuput dan mengetahui ada orang mendekat saksi Joni dan Fuput merapikan pakaian mereka dan anak 1. Anang menyapa mereka "Halo bro.." Bahwa selanjutnya para anak dan kedua temannya menyuruh saksi Joni dan saksi Fuput untuk melakukan hubungan suami istri kembali. Bahwa awalnya saksi Joni dan saksi Fuput menolak melakukannya namun kemudian saksi Rio berkata kepada saksi Joni dan Fuput "Kowe pilih tak omongne wong tuwomu opo mbaleni maneh, timbang kwe tak entekne nang kene ambi tak celokne wong kene' (kamu pilih saya beritahu orang tuamu apa mengulangi lagi, dari pada kamu saya habisi disini sama saya panggilkan orang sini) dan anak Anang juga berkata "Kwe nek ora gek age tak anu wong limo iki,opo mbi gimbrut seng kringsilane telu" (kamu jika tidak segera berbuat akan dikerjai orang lima ini, apa sama gimbrut yang testisnya tiga). Bahwa kemudian saksi Fiki juga menimpali "Age ndang lebokno selak akeh wong kae lho" (cepat masukkan keburu banyak orang) dan anak Aziz juga berkata "Cepet ndang selak enek uwong gek barno, ke lo enek pak Sarni wong kene gek ndang barno nek pengen kowe cepet ngaleh" (cepat selesaikan keburu ada orang banyak, itu lho ada pak Sarni orang sini, cepat selesaikan kalau kamu ingin segera pergi). Bahwa atas ancaman dari para anak dan teman-temannya tersebut saksi Joni dan Fuput merasa ketakutan dan akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri di hadapan para anak dan teman-temannya sampai selesai.

Bahwa pada saat saksi Joni dan saksi Fuput bersetubuh anak Anang Ma'rup merekam perbuatan persetubuhan tersebut bergantian dengan saksi Fiki tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi Joni maupun saksi Fuput akan tetapi langsung merekamnya dengan menggunakan HP merk Nokia Express Musik milik anak Anang Ma'rup. Bahwa setelah selesai merekam kemudian video tersebut oleh anak Anang Ma'rup ditransfer/dikirim ke handphone milik anak Aziz, anak Heny dan saksi Fiki. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 sekira jam 19.45 wib saksi Nurhadi (paman saksi Fuput) melihat video persetubuhan antara saksi Fuput dan Joni dari handphone Sdri.Bayu dan akhirnya saksi Nurhadi bertanya kepada saksi Fuput dan setelah saksi Nurhadi mendapat penjelasan dari saksi Fuput selanjutnya keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehubungan dengan beredarnya video tersebut.

Dari sudut pandang Penuntut Umum, perkara tersebut dilatarbelakangi hal-hal iseng. Usai kejadian tersebut, Penuntut Umum menegaskan bahwa *handphone* Anang Ma'rup mengalami kerusakan. Kemudian dilakukanlah perbaikan. Saat diperbaiki itulah, file rekaman perbuatan yang mengandung unsur pornografi antara saksi Joni dan Fuput tersebut, mulai beredar.

“Tidak diketahui, pihak mana yang lebih dahulu menyebarkan (file rekaman pornografi). Akhirnya terekspose-lah. Kenapa saya tidak menggunakan UU ITE (untuk dakwaan sekaligus tuntutan), karena mereka (baca: para terpidana anak) hanya merekam untuk mereka sendiri, utamanya si pemilik *handphone*. Sehingga tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menyebarkannya,” terang RR Rulis Sutji Sjahesti, SH, sang Penuntut Umum.

Tidak digunakannya UU ITE dalam putusan perkara ini, karena berangkat dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yang memang tidak merujuk UU ITE. Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct, Penuntut Umum mendakwa para terdakwa anak tersebut dengan surat dakwaan tunggal. Yakni melanggar Pasal 29 UU Pornografi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dakwaan tunggal muncul karena diyakini oleh

Penuntut Umum bahwa hanya ada satu tindak pidana yang dapat didakwakan kepada para terdakwa anak tersebut.

Menurut hakim Dian Mega Ayu, SH, MH, surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan serta menjatuhkan putusan. Posisi hakim, menurutnya hanya memeriksa, memutus dan mengadili berdasarkan pada surat dakwaan tersebut. Sehingga ketika dakwaan merujuk pada UU Pornografi, putusan harus selaras dengan tersebut. Ketika dakwaan merujuk pada UU ITE, hakim tentu akan menjatuhkan putusan selaras dengan dakwaan pula.

“Surat dakwaan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian hakim tidak boleh memutus atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUH Pidana. Bahwa dalam membuat suatu putusan, diperhatikan dua hal, yakni surat dakwaan jaksa penuntut umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan,” penjelasan hakim Dian Mega Ayu, SH, MH, saat diwawancara penulis pada Senin, 8 Mei 2017.

3.2 Dampak Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct dengan Pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Menurut sudut pandang Penuntut Umum, dampak hukum yang kemudian muncul apabila UU ITE dijadikan dasar rujukan dakwaan adalah potensi tidak dapatnya unsur-unsur dalam UU ITE dibuktikan dalam persidangan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, tentu ada potensi dakwaan tidak bisa diterima atau terdakwa dinyatakan bebas. Posisi ini dapat dipastikan membawa pengaruh terhadap kredibilitas Penuntut Umum. Sehingga, ketika diyakini unsur-unsurnya lebih mengarah pada UU Pornografi, UU ITE tidak lagi digunakan untuk mendakwa para terdakwa anak tersebut.

Salah satu kelemahan unsur dari UU ITE yang terjadi pada perkara ini adalah potensi sulitnya pembuktian pengunggah pertama rekaman yang diduga memiliki unsur pornografi tersebut. Sehingga, Penuntut Umum memilih memberikan dakwaan dengan tingkat pembuktian lebih kuat untuk dibuktikan.

Hukum pidana adalah hukum yang terikat pada ruang dan waktu. Sehingga mengenai kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, harus jelas diketahui. Penentuan tempat terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting. Apabila penuntut umum tidak memuat unsur ini dalam dakwaannya tentu mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum.⁶

“Apabila dakwaan tidak bisa dibuktikan dan terdakwa dinyatakan bebas, tentu kami sebagai Penuntut Umum dianggap salah dalam menerapkan aturan. Selain itu, dakwaan kami mengarah untuk memberikan efek jera. Karena mereka masih anak-anak, usia sekolah dan masa depan masih panjang. Apabila kita paksakan dengan UU ITE yang mungkin ancaman hukumannya terlalu berat, kasihan juga.”⁷

Sudut pandang hakim juga selaras dengan Penuntut Umum. UU ITE dan UU Pornografi, menurut pemahaman hakim, tidaklah sama konteks pembahasannya terkait tindak pidana pornografi. UU ITE mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan UU Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi secara spesifik, yang menimbulkan eksploitasi seksual dan melanggar norma.

“Pornografi cenderung mengumbar aksi, sedangkan ITE adalah perihal media untuk dapat diaksesnya aksi tersebut. Apabila dakwaan itu tidak tunggal atau alternatif, semisal didakwa dengan UU Pornografi atau UU ITE, tentu kami sebagai hakim akan mempertimbangkan lebih dalam. Tidak menutup kemungkinan, kedua aturan tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan. Tetapi untuk perkara ini, dengan dakwaan tunggal, sudah cukup bisa dibuktikan unsur-unsurnya dalam UU Pornografi,” jelas hakim Dian Mega Ayu, SH, MH.

Dampak lain yang perlu dipertimbangkan adalah rasa keadilan bagi para terpidana anak tersebut. Ketika UU Pornografi sudah dianggap memenuhi unsur dalam dakwaan dan ancaman hukuman cukup ringan, tentu diharapkan mampu menumbuhkan rasa keadilan. Selain itu, para

⁶ Jan Ramelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 195.

⁷ RR Rulis Sutji Sjahesti, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct, *Wawancara Pribadi*, Pacitan, 16 Mei 2017, pukul 10:00 WIB.

terpidana juga disamakan bobot perkaranya dengan munculnya dakwaan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁹

“Semoga perkara ini bisa menjadi momentum penting dalam proses hukum acara pidana di Indonesia. Munculnya UU ITE dan UU Pornografi ini, juga bisa menjadikan pemerintah dapat memperbaiki regulasi yang ada, terutama apabila muncul kekurangan, demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” harapan hakim Dian Mega Ayu, SH, MH.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct berangkat dari dakwaan Penuntut Umum yang merujuk ketentuan Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dengan tujuan menimbulkan efek jera namun posisi para terpidana masih berstatus anak dan pelajar, digunakanlah ketentuan yang dirasa cukup ringan. Selain itu, penggunaan ketentuan dalam UU Pornografi, lebih ditekankan karena unsur pidananya lebih mudah untuk dibuktikan. Berbeda apabila dipaksakan dengan menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁸ Pasal 55 KUH Pidana menyebutkan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

⁹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, hal 5.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehingga, tanpa bermaksud mengesampingkan, digunakanlah ketentuan UU Pornografi yang lebih mudah untuk dibuktikan dalam dakwaan Penuntut Umum. Begitu pula putusan yang dijatuhkan, hakim tunggal Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara ini, juga selaras dengan dakwaan tunggal tersebut, sehingga menjatuhkan putusan mengembalikan para terpidana anak tersebut kepada orang tua mereka. Apabila unsur dalam UU Pornografi lebih bisa dibuktikan, dikuatkan dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct, hal ini menegaskan jika UU Pornografi lebih dominan dalam perkara tersebut. Apabila UU ITE digunakan, dan saat persidangan justru tidak dapat dibuktikan unsur-unsurnya, justru memiliki potensi dakwaan kabur atau tidak dapat diterima. Sehingga, para terdakwa dapat dinyatakan bebas ketika mereka mengajukan keberatan. Kredibilitas Penuntut Umum juga dipertanyakan ketika keadaan tersebut benar-benar terjadi.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang ditarik di atas, penulis kiranya memberikan saran sebagai berikut: Pertimbangan untuk menimbulkan efek jera, kiranya harus dibarengi dengan tindakan berupa sanksi yang tegas. Keberadaan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, seolah menutup ruang gerak hakim dalam mengambil putusan. Terbukti, dalam perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct ini, hakim hanya dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan sesuai dakwaan tunggal yang diajukan Penuntut Umum. Tindakan para terpidana anak tersebut, sedikit banyak memiliki kaitan dengan ketentuan UU ITE. Kajian akademis mendalam, tentu diperlukan ketika terdapat dakwaan alternatif. Sehingga diharapkan upaya efek jera bagi para pelakunya, bisa efektif dijalankan. Selain itu, kiranya pemerintah harus bisa memberikan gambaran tegas, terkait ketentuan mengenai tindak pidana pornografi yang melibatkan adanya unsur pemanfaatan teknologi informasi. Sebab, selama ini UU ITE hanya mengatur mengenai istilah “kesusilaan”. Sedangkan UU Pornografi spesifik mengatur mengenai

perbuatan yang dinilai mengandung unsur “melanggar kesusilaan”. Dua aturan ini harus tegas, sehingga para penegak hukum, bisa leluasa mencari pembuktian ketika terdapat perkara tindak pidana yang mengarah pada pornografi, namun berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Merujuk putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct ini, hakim tentu dapat menjatuhkan putusan bersifat extraordinary atau putusan luar biasa, berangkat dari pandangan subjektif hakim. Utamanya ketika Penuntut Umum menyodorkan dakwaan tunggal. Sehingga hakim bisa lebih leluasa melihat posisi kasus yang ada, sekaligus kontrol terhadap Penuntut Umum untuk lebih luas memandang aturan-aturan yuridis yang berlaku. Tidak ada jaminan dakwaan tunggal dapat dibenarkan. Pada posisi inilah, peran Penuntut Umum dipertaruhkan. Sehingga dampak putusan tidak bisa diterima atau kabur, bisa menjadi celah bagi para terdakwa maupun unsur pengasih hukum dalam membela diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung;
- Jan Ramelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Neng Djubaedah, 2011, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tatanusa.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.